

## Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Kantor Sekretariat Kabupaten Tolitoli

Moh. Ma'ruf Bantilan <sup>1\*</sup>; Rahmawati <sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Madako Tolitoli

email: [moh.maruf\\_bantilan@umada.ac.id](mailto:moh.maruf_bantilan@umada.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Sekretariat Kabupaten Tolitoli dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi sistematis, wawancara terstruktur, dan analisis dokumentasi menyeluruh. Temuan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* tetap kurang optimal, terutama mengenai dimensi disiplin, akuntabilitas karyawan, dan keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, hambatan dalam pengelolaan data kemiskinan menghambat upaya pemerataan kesejahteraan. Studi ini mengadvokasi peningkatan pelatihan karyawan, memperkuat keterlibatan demokrasi, dan kemajuan dalam sistem data kemiskinan untuk memfasilitasi tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel.

**Kata Kunci : Penerapan Prinsip *Good Governance*; Sekretariat Kabupaten Tolitoli**

### PENDAHULUAN

*Good governance* merupakan konsep penting dalam penataan kerangka pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Konsep ini berkaitan dengan tata kelola yang menggarisbawahi prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, kesetaraan, inklusivitas, di samping penegakan supremasi hukum. Seperti yang diartikulasikan oleh Gibson (2001). Prinsip-prinsip mendasar yang berperan sebagai dasar dalam pembentukan sistem pemerintahan, terutama di Indonesia, sangat vital untuk menjamin bahwa pemerintah tidak hanya melayani kepentingan umum tetapi juga membangun tatanan pemerintahan yang baik, bebas dari praktik korupsi. Dalam hal ini, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat penting, karena mereka mendukung penguatan integritas dalam administrasi pemerintahan (Firmansyah & Syam, 2022; Rahim *et al.*, 2023) Intinya, *good governance* bercita-cita untuk menumbuhkan paradigma tata kelola yang mampu memberikan layanan publik secara optimal, memberdayakan warga negara, dan menambah legitimasi pemerintah dalam persepsi masyarakat.

Di Indonesia, wacana seputar *good governance* telah mendapatkan momentum sejak era reformasi tahun 1998, yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan untuk pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel selaras dengan kepentingan publik. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di berbagai tingkatan pemerintahan merupakan upaya sistematis untuk menanamkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai prasyarat untuk pembentukan pemerintahan yang ditandai dengan profesionalisme dan integritas. Dalam konteks tata kelola lokal, penerapan prinsip-prinsip *good governance* telah menjadi sangat penting, terutama dalam mengatasi

dinamika pembangunan yang semakin rumit dan meningkatnya harapan publik untuk peningkatan kualitas layanan publik (Dwiyanto, 2006).

Kabupaten Tolitoli sebagai daerah berkembang di Provinsi Sulawesi Tengah, menghadapi tantangan yang signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Titik fokus pengawasan adalah Kantor Sekretariat Distrik, yang berfungsi sebagai penghubung administrasi dan koordinasi pemerintah daerah. Kantor ini tidak hanya beroperasi sebagai pelaksana teknis administrasi tetapi juga melambangkan mekanisme tata kelola yang beroperasi di tingkat kabupaten. Akibatnya, kemandirian pelaksanaan *good governance* di Kantor Sekretariat Kabupaten Tolitoli merupakan indikasi tingkat komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang sehat. Namun dalam praktiknya, berbagai hambatan tetap ada. Isu-isu seperti partisipasi publik yang tidak memadai dalam proses pengambilan keputusan, transparansi yang tidak memadai dalam pengelolaan anggaran, pertanggungjawaban kinerja pemerintah yang lemah, dan kurangnya respons terhadap aspirasi masyarakat menimbulkan hambatan yang signifikan terhadap realisasi *good governance* yang komprehensif. Selain itu, faktor-faktor internal, termasuk budaya birokrasi hierarkis, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi yang kurang optimal, semakin mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip-prinsip ini (Effendi, 2001; Dwiyanto, 2006).

Mengingat keadaan ini, penelitian ini berusaha untuk memastikan sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dalam Kantor Sekretariat Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini sangat penting, mengingat bahwa penerapan Tata Kelola yang Baik secara efektif akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah, dan pada akhirnya percepatan tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan tata kelola yang lebih efektif, khususnya dalam konteks Pemerintah Kabupaten Tolitoli.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai penerapan *good governance*. Teknik pengumpulan data meliputi; observasi lapangan yaitu melihat langsung perilaku dan aktivitas pegawai di Kantor Sekretariat Kabupaten Tolitoli. Wawancara mendalam dilakukan dengan pegawai dan pejabat terkait untuk memperoleh informasi kualitatif mengenai penerapan prinsip *good governance*. Dokumentasi yakni mengkaji dokumen resmi, laporan, dan data terkait yang mendukung analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada indikator *good governance* yang dikemukakan oleh Keban (2000) yaitu kemampuan, akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan pemerataan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kemampuan Pegawai**

Disiplin adalah faktor kunci dalam memodulasi perilaku manusia sejalan dengan standar dan nilai-nilai organisasi yang sangat penting untuk keberhasilan organisasi. (*Disciplinary Action Approaches-Legal Practitioner Perspectives*, 2023). Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pegawai di Kantor Sekretariat Kabupaten Tolitoli memiliki kompetensi dasar yang memadai sesuai bidang tugasnya. Namun, terdapat kelemahan dalam aspek disiplin dan tanggung jawab. Aspek disiplin pegawai sangat penting untuk mencapai kinerja organisasi. Ini memastikan

kepatuhan pada saat peraturan dan tugas diselesaikan dengan baik sehingga mampu mempertahankan lingkungan kerja profesional (Nelfa & Heikal, 2024). Beberapa pegawai kurang serius dalam menjalankan tugas, yang berdampak pada efektivitas kerja secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan temuan Effendi (2001) yang menyatakan bahwa disiplin pegawai merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan *good governance*.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas pegawai sudah menunjukkan perkembangan positif, dengan adanya pengawasan dan evaluasi rutin dari pimpinan daerah. Namun, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban masih perlu diperkuat agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

## 3. Partisipasi dalam Proses Demokrasi

Partisipasi pegawai dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan masih terbatas. Padahal, partisipasi aktif sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan (Gibson, 2001). Sistem pengambilan kebijakan yang belum sepenuhnya sistematis dan bersinergi menjadi kendala utama dalam hal ini.

## KESIMPULAN

Penerapan prinsip *good governance* di Kantor Sekretariat Kabupaten Tolitoli masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek disiplin dan tanggung jawab pegawai, serta partisipasi dalam pengambilan kebijakan. Penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi juga menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, perhatian serius terhadap pengelolaan data kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan harus menjadi prioritas agar prinsip *good governance* dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Disciplinary Action Approaches-Legal Practitioner Perspectives*. (2023). *International Journal For Multidisciplinary Research*, 5(3). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i03.3200>
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, S. (2001). *Good Governance dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Firmansyah, V. Z. and Syam, F. (2022). *Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia*. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325-344. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>
- Gibson, C. C. (2001). *Governance and Good Governance*. *Journal of Political Science*, 45(2), 123-145.
- Keban, Y. M. (2000). *Manajemen Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nelfa, F., & Heikal, J. (2024). Analisis Penyebab Rendahnya Kedisiplinan Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dharmastraya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Grounded Theory. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)*, 6(1), 67–78. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i1.2963>
- Rahim, A., Safitri, N. U., Nurjanah, N., Anabah, S., & Nurhikmah, W. (2023). *Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia*. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5790-5794